

**TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP: KONSERVASI PENYU DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INDONESIA**

Siti Arieta

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

Meilanny Budiarti

Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran Bandung

Teguh Setiandika Igiasi

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

Email: arietasiti@umrah.ac.id

ABSTRACT

The ongoing tragedy of the commons and anomie in consuming turtles and their eggs as economic objects are causing the threat of extinction of turtle species. Currently, turtle conservation requires the entire community to work integrately. This study examined stakeholders engagement in turtle conservation in the Anambas Islands Regency, Riau Islands Province, Indonesia. The goal of this research is to describe the involvement and strategies of stakeholders in turtle conservation and, based on the research findings, to recommend policy directions for developing a sustainable turtle conservation and management model. The study used mixed methodologies, combining in-depth interviews and the assessment of social return on investment (SROI). The result of this study has shown collaborative management in turtle conservation and has resulted in positive changes. The primary requirements for turtle conservation are the possession of knowledge of sustainability, economic capital, and social capital. Since 2014, Premier Oil Indonesia has been the only stakeholder with a successful turtle conservation initiatives as part of its corporate social responsibility (CSR). Premier Oil Indonesia has a class habitus acknowledged among other stakeholders and this has brought the legitimate position to company in social structure in Anambas. Although Premier Oil's initiatives have been effective, the fundamental difficulty is that there are still groups against the idea of turtle conservation. Therefore, the patrol, awareness building and law enforcement play an active part in successing turtle conservation.

Keywords: turtle conservation, *anomie*, *tragedy of the commons*, stakeholders, CSR

ABSTRAK

Ancaman kepunahan spesies penyu diakibatkan oleh berlangsungnya *tragedy of the commons* serta kondisi *anomie* yang menyebabkan penyu dan telurnya menjadi objek ekonomi. Saat ini, perlindungan terhadap penyu mengamanatkan seluruh masyarakat berintegrasi untuk melakukan konservasi. Penelitian ini mengkaji tentang keterlibatan para aktor yang terlibat dalam upaya konservasi penyu di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan keterlibatan dan strategi para pemangku kepentingan dalam konservasi penyu di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan berdasarkan temuan penelitian akan merekomendasikan arah kebijakan dalam membangun model pengelolaan konservasi penyu yang berkelanjutan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode campuran, yakni kualitatif melalui wawancara mendalam dan kuantitatif dengan penghitungan *Social Return of Investment* (SROI). Temuan penelitian menyatakan bahwa konservasi penyu di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dilakukan secara kolaboratif dan mengalami perubahan positif yang signifikan. Pengetahuan akan keberlanjutan dan modal ekonomi serta modal sosial menjadi syarat utama yang harus dimiliki oleh pihak yang berpartisipasi dalam konservasi penyu. Premier Oil Indonesia merupakan satu-satunya stakeholder yang sukses menjalankan kegiatan konservasi penyu sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) sejak tahun 2014. Premier Oil Indonesia memiliki *habitus* kelas yang diakui oleh pemangku kepentingan lain, dan perusahaan ini menduduki posisi yang terlegitimasi dalam struktur masyarakat Kepulauan Anambas. Meskipun kegiatan yang dilakukan oleh Premier Oil memperoleh kesuksesan, tantangan utama yang dihadapi adalah masih terdapat pihak-pihak yang tidak mendukung konservasi. Untuk mengantisipasi hal ini, peranan Pemerintah dan penegak hukum sudah cukup maksimal dalam menjalankan patroli, sosialisasi dan penegakan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: konservasi penyu, *anomie*, *tragedy of the commons*, *stakeholders*, CSR

I. Pendahuluan

Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya laut telah menghadapi tantangan perilaku *anomie* masyarakat lokal (Jentoft 2000), yakni pemanfaatan berlebih oleh masyarakat pesisir akibat standar moral yang rendah yang menyebabkan kegagalan komunitas dalam membentuk kohesi sosial untuk mempertahankan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Hal ini sangat disayangkan mengingat masyarakat lokal memiliki ketergantungan yang erat serta subsisten terhadap sumberdaya alam, namun di sisi lain mereka berpartisipasi dalam kegiatan pemanfaatan yang destruktif dan tidak berkelanjutan.

Kondisi *anomie* berkembang menjadi aksi sosial kolektif yang menyebabkan terancamnya kelestarian sumberdaya pesisir dan lautan untuk kebutuhan masa depan. Hilangnya integrasi antara dimensi alam dan manusia memerlukan pengorganisasian aktor secara komprehensif yang ditujukan untuk mengelola perilaku manusia (Pitcher and Lam 2010). Pengorganisasian aktor merupakan bagian dari strategi pengelolaan yang mengintegrasikan kondisi sosial ekonomi, tata kelola, dan institusi sosial ke dalam perspektif ekologi, ekonomi, sosial, etika, dan kelembagaan yang diperlukan untuk pengelolaan sumberdaya pesisir dalautan

Studi tentang perlindungan penyu telah dilakukan sejak 4 dekade, dimana penelitian sebelumnya mengkaji tentang pola reproduksi (Priyono 1985; Cadi et al. 2004), tingkat mortalitas tukik (Gyuris 1994; Janzen et al. 2000), dampak pemanasan global terhadap spesies penyu (Fuentes et al. 2011; Pike

2013), gerakan lingkungan perlindungan penyu dan konservasi penyu (Campbell 2007; Yeh et al. 2021). Namun, kajian yang membahas konservasi dan pengelolaan penyu dari sudut pandang sosiologi dan kesejahteraan masyarakat masih jarang ditemukan. Dengan demikian, penelitian ini akan melihat konservasi dan pengelolaan penyu dari sudut pandang keterlibatan aktor, termasuk dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan tersebut.

Spesies penyu sebagai bagian dari sumberdaya pesisir yang membutuhkan perlindungan dan pengelolaan akibat kegiatan memperniagakan/ memperdagangkan dan menyimpan/memiliki telur penyu masih menjadi praktek ilegal yang dilakukan di Indonesia. Terdapat 7(tujuh) jenis penyu di dunia yang telah dinyatakan sebagai hewan yang terancam punah oleh CITES sejak tahun 1980, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah melarang praktek ilegal atas penyu, namun hal tersebut masih berlangsung sampai saat ini (Jemarut et al. 2021).

Indonesia memiliki 6 (enam) jenis penyu yakni penyu hijau, sisik, lekang, belimbing, pipih, dan penyu tempayan yang tersebar di berbagai wilayah. Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Lombok Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Riau masing-masing hanya memiliki 1 lokasi ditemukannya telur penyu, sedangkan Kepulauan Riau memiliki 4 wilayah administrasi yakni Bintan, Karimun, Kepulauan Anambas dan Natuna yang masing-masing memiliki lebih dari 1 lokasi peneluran penyu (KKP 2016).

Berdasarkan pertimbangan jumlah lokasi peneluran penyu di Kepulauan Riau, maka penelitian ini dilakukan di salah satu kabupaten yakni Kepulauan Anambas dengan melihat keunikan dalam kesuksesan konservasi penyu yang dilakukan oleh pihak swasta sebagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Keterlibatan aktor dalam penelitian ini juga dapat dilihat sebagai sebuah proses dialektika agen-struktur yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (1977) dimana konservasi penyu di Anambas merupakan sebuah arena kompetisi para aktor dengan kepemilikan modal yang berbeda-beda untuk menempati posisi sosial tertinggi dan terlegitimasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan keterlibatan dan strategi para pemangku kepentingan dalam konservasi penyu di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan berdasarkan temuan penelitian akan merekomendasikan arah kebijakan dalam membangun model pengelolaan konservasi penyu yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal dalam peningkatan ekonomi.

II. Tinjauan Teoritis

***Stakeholders* menurut Pandangan Bourdieu**

Bertemunya realitas subjektif yang merupakan peristiwa yang terjadi sebagai eksternalitas manusia, dengan realitas objektif yang merupakan internalisasi nilai dan pengalaman diri dalam suatu arena akan menghasilkan sebuah realitas baru (Leaney 2019). Arena menjadi tempat bertemu dan berperannya agen dalam realitas sosial dalam kompetisi kekuatan yang dinamis yang memiliki beragam potensi (McNay 1999).

Dalam arena, terdapat kelas sosial sosial yang menurut pandangan Bourdieu dibentuk oleh *habitus*, dimana pembagiannya tidak didasarkan pada pembagian ekonomi atau produksi (borjuis-proletar) seperti yang dikemukakan oleh Marx (Harker et al. 1990). *Habitus* dalam arena yang spesifik akan menggambarkan partisipasi aktor dan menentukan kelas sosial seseorang. Semakin partisipatif aktor dalam sebuah arena, maka tingkatan kelas sosialnya semakin tinggi.

Berbeda dengan kelas sosial, penempatan posisi agen dalam suatu arena didasarkan pada akumulasi kepemilikan modal (Hayes 2020). Modal merupakan konsentrasi kekuatan spesifik yang beroperasi dalam ranah atau kemampuan yang dimiliki aktor yang digunakan untuk mempertahankan eksistensinya, dan mengendalikan orang lain. Modal terdiri dari modal ekonomi, modal sosial, modal kultural maupun modal simbolik (Ritzer 2010). Modal kultural merupakan pengetahuan yang diperoleh, kode-kode budaya, etika yang berperan dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal kultural menjadi sebuah nilai tambah bagi kekuatan aktor untuk menjembatani tujuan dengan mengintegrasikan perspektif lokal serta merevitalisasi budaya lokal dalam setiap implementasi kekuatan.

Konservasi Penyu Sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan

Pada awal kemunculannya di Indonesia, tanggung jawab sosial atau dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR) dilaksanakan karena kewajiban untuk mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas yang mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Seiring dengan aktivitas perusahaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kebermanfaatan pelaksanaan CSR bagi *stakeholder* dari waktu ke waktu semakin meningkat tidak hanya dalam bentuk *charity*-melainkan juga berfokus kepada *five bottom line sustainable development* yang meliputi *people, prosperity, peace, partnership, and planet*.

Program konservasi penyu sebagai kegiatan CSR bertujuan menjaga, melindungi dan melestarikan keseimbangan ekosistem alam dengan cara mencegah kepunahan biota laut, salah satunya hewan penyu. Di sisi lain, program konservasi penyu pun mendatangkan keuntungan bagi warga di sekitar wilayah konservasi, yaitu dengan dijadikannya daerah ekowisata, sehingga menjadi peluang peningkatan kualitas ekonomi. Dengan demikian, CSR dilaksanakan oleh manajemen perusahaan sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan pencapaian manfaat secara berkesinambungan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan memaksimalkan dampak positif dari program CSR yang dilaksanakan.

Bagi perusahaan, pelaksanaan CSR merupakan bentuk nyata perhatian yang diberikan perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan menjaga hubungan baik dengan *stakeholders*-nya baik dengan pemerintah maupun masyarakat di sekitar perusahaan. Pelaksanaan CSR merupakan wujud penciptaan makna tersendiri bagi perusahaan yang hidup bersama di tengah masyarakat. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan investasi sosial yang harus mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dalam bentuk finansial maupun nilai sosial, sehingga perusahaan perlu melakukan upaya penghitungan nilai dampak dan manfaat dari program CSR yang dilakukannya.

Social Return on Investment (SROI) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk

mengukur manfaat dari investasi sosial yang dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada pemangku kepentingan (*stakeholder*), SROI akan mengidentifikasi, menilai, dan mengukur total manfaat yang dihasilkan dari suatu program ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui perhitungan SROI, perusahaan dapat menghitung investasi sosial dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam aktivitas bisnis yang dilakukannya untuk dapat terus bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Konsep *Tragedy of the Commons* pada Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Konsep *tragedy of the commons* membentuk asumsi sumber daya alam tidak memiliki kepemilikan yang berimplikasi pada sistem tenurial akses terbuka yang memberikan hak kepada setiap orang untuk mengambil kendali. Akibatnya akan terjadi persaingan dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya tanpa ada batasan. Kondisi ini menggambarkan suatu sistem yang menjebak siapa pun yang tidak mampu menahan diri dalam menggunakan sumber daya sesuai dengan kapasitasnya. Cepat atau lambat, keterbatasan alam untuk menyediakan kebutuhan manusia akan terbukti seiring dengan menipisnya sumber daya bersama tersebut (Hardin 1968).

Sebagai tanggapan, Hardin (1968) menawarkan kepemilikan pribadi atas sumber daya alam sebagai solusinya. Namun, konsep kontroversial ini juga mendapat kritik melalui '*the benefit of the Commons*' yang menyatakan bahwa kepemilikan kolektif tidak berarti 'bebas untuk semua' (Berkes et al. 1989). Dengan demikian, milik bersama adalah kepemilikan komunal yang dijalankan oleh kelompok-kelompok sosial yang menuntut hak kepemilikan atas pengelolaan dengan mengecualikan pihak lain dalam pemanfaatan sumber daya alam. Di antara kelompok pemilik ini, beberapa aturan dan nilai mengatur alokasi izin eksploitasi sumber daya (Berkes, & Folke 1992; Berkes et al. 1994).

Tidak hanya menunjukkan bahwa kepentingan pribadi tidak dominan, tetapi komunitas subsisten juga meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dalam menciptakan institusi dengan fungsinya untuk mencegah *tragedy of the commons*. Dengan demikian, bentuk kepemilikan komunal ini mencerminkan praktik-praktik tertentu dalam menjaga distribusi akses yang adil. Korten (1987) menjelaskan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat sebagai bentuk mekanisme yang efektif untuk pengelolaan konflik, kontrol masyarakat, dan pengelolaan produksi, sistem lokal, dan termasuk pengawasan partisipatif dalam masyarakat, dan akuntabilitas lokal dalam pengelolaan.

II. Metode Penelitian

Metode kualitatif digunakan pada 3 lokasi utama, yakni wilayah Tarempa, Matak dan Pulau Pahat sebagai lokasi utama konservasi penyu di Kabupaten Kepulauan Anambas dari Juni-Juli 2021. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, yang dilakukan di lokasi konservasi telur penyu Pulau Pahat, kantor pemerintahan, perumahan penduduk di Matak dimana pada pulau utama ini banyak penduduknya yang memiliki lahan tempat bertelurnya penyu. Data sekunder terdiri dari penelitian sebelumnya tentang konservasi dan pengelolaan penyu berupa artikel akademik, laporan penelitian yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Informan

Kriteria Informan	Jumlah	Rentang Usia (tahun)
Instansi Pemerintahan	4	30-48
Divisi CSR Perusahaan	2	50-55
Penjaga Pulau Konservasi Penyu	2	35-45
Masyarakat Pemilik Lahan (tempat penyu bertelur)	4	45-60
Tokoh Masyarakat	3	45-55
Total	14	

Kriteria informan didasarkan pada partisipasi para stakeholders yang terlibat dalam pemanfaatan dan konservasi penyu dalam 10 tahun terakhir, yakni Satuan Kerja LKKPN Pekanbaru, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Kepolisian, Dinas Pariwisata, Premier Oil Indonesia, tokoh masyarakat dan pemilik lahan pasir. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam berdurasi 45-90 menit yang mengungkapkan pengetahuan, pengalaman dan strategi perlindungan penyu di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Baik data primer dan sekunder dianalisa menggunakan 3 tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Taylor et al. 2015). Informasi kualitatif juga diolah menjadi kuantifikasi penghitungan dampak konservasi yang dilakukan oleh perusahaan yakni Premier Oil Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi konservasi, dengan menggunakan metode *Social Return of Investment* (SROI).

Social Return on Investment (SROI) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur manfaat dari investasi sosial yang dilakukan. Dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada pemangku kepentingan (*stakeholder*), SROI akan mengidentifikasi, menilai, dan mengukur total manfaat yang dihasilkan dari suatu program ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui perhitungan SROI, perusahaan dapat menghitung investasi sosial dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam aktivitas bisnis yang dilakukannya untuk dapat terus bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pengembalian sosial atas investasi telah muncul sebagai teknik yang disukai untuk mengukur dampak dan hasil (Millar & Hall 2013). SROI mengukur nilai manfaat sosial yang diciptakan oleh organisasi (termasuk lembaga) dalam kaitannya dengan biaya relatif untuk menciptakan manfaat (Olsen & Lingane 2004). Sejalan dengan makna yang dikatakan oleh Nicholls et al. (2012), *Social Return on Investment* (SROI) merupakan suatu kerangka untuk mengukur dan mengakuntansi suatu konsep nilai

yang lebih luas untuk mengurangi ketimpangan, degradasi lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan dengan memasukkan nilai sosial, lingkungan biaya ekonomi dan manfaat (Pathak 2014). SROI merupakan kajian mengenai nilai mengenai perubahan yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang mencakup studi kasus dan informasi kualitatif, kuantitatif dan keuangan. Secara sederhana, perhitungan SROI menggunakan elemen analisis biaya-manfaat, seperti di bawah ini:

$$\text{SROI Ratio} = \frac{\text{Present Value}}{\text{Value of Input}}$$

Sumber: Millar & Hall (2013)

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung *present value* pada perhitungan SROI yang bersifat evaluatif dengan data *multy years* adalah sebagai berikut:

Present Value	=	Value of impact in	+	Value of impact in	+	Value of impact in	+	Value of impact in	+	Value of impact in
		$\frac{\text{Year 1}}{(1+r)}$		$\frac{\text{Year 2}}{(1+r)^2}$		$\frac{\text{Year 3}}{(1+r)^3}$		$\frac{\text{Year 4}}{(1+r)^4}$		$\frac{\text{Year 5}}{(1+r)^5}$

Laporan yang disajikan merupakan jenis perhitungan SROI yang disajikan adalah merupakan kajian evaluatif dari konservasi penyu yang dilakukan oleh Premier Oil Indonesia di tahun 2017 hingga 2021.

IV. Hasil dan Diskusi

Dilema kewenangan Pemerintah dan penguasaan lahan oleh masyarakat pada konservasi penyu di Kepulauan Anambas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/Kepmen-KP/2014, wilayah perairan Anambas ditetapkan sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas yang berimplikasi pada terbentuknya sistem zonasi perairan yang yaitu zona perikanan berkelanjutan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir, zona pemanfaatan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan wisata air, zona inti untuk kepentingan konservasi, serta zona lainnya.

Sebelum sistem zonasi ditetapkan, inisiasi untuk melakukan konservasi penyu telah dimulai sejak tahun 2009 dengan lokasi percontohan yang terletak di Pulau Durai, Desa Bayat Kecamatan Siantan meskipun kegiatan ini mengalami kegagalan akibat terlalu banyak pihak yang terlibat tanpa disertai oleh mekanisme monitoring yang memadai. Pulau Durai diyakini sebagai tempat pendaratan penyu untuk bertelur dengan frekuensi dan jumlah telur terbanyak sehingga konservasi penyu kembali dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2014 sampai dengan 2017.

Satuan Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yakni Loka KKPN Pekanbaru yang berlokasi di Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan instansi teknis yang berwenang untuk mengelola Taman Wisata Perairan (TWP), kembali mengalami kegagalan dalam upaya mengelola penyu di Pulau Durai. Meskipun kompensasi untuk tidak mengambil telur telah dibayarkan kepada pemilik lahan, mereka tetap menjual telur-telur tersebut dengan pembenaran bahwasanya

jumlah yang dijual hanya sedikit bila dibandingkan dengan yang dibiarkan menetas. Hal ini menjadikan konservasi menjadi tidak maksimal sehingga program ini akhirnya dihentikan, karena dilema “konservasi vs jual” akan menjadi senjata makan tuan bagi pemerintah yakni membiarkan adanya penjualan.

Hampir seluruh pasir putih di pulau-pulau kecil yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas disinggahi penyu untuk bertelur, dimana dalam sekali pendarat penyu dapat menelurkan paling sedikit 100 buah telur dalam satu lubang peneluran. Namun secara turun-temurun, pulau-pulau kecil ini merupakan warisan keluarga dan hasil kebun dari pulau tersebut, antara lain kelapa merupakan objek penghasil tambahan ekonomi. Bagi masyarakat Kepulauan Anambas, telur penyu dianggap sebagai hasil kebun dan adalah lumrah untuk mengkonsumsi hasil kebun. Budaya konsumsi inilah yang menjadi tantangan utama konservasi penyu.

Meskipun pemerintah telah menetapkan sistem zonasi dan menjadikan LKKPN Pekanbaru memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi patroli dalam upaya memastikan pemanfaatan dari masyarakat sudah sesuai dengan zona-zonanya, konservasi penyu masih mengalami persoalan diluar budaya konsumsi masyarakat. Zona inti untuk keperluan konservasi tidak dapat diterapkan untuk perlindungan penyu akibat prinsip area pengelolaan TWP adalah pengelolaan laut (air) sehingga daratan termasuk pasir tempat bertelurnya penyu bukanlah objek kewenangan pemerintah. Hal ini menimbulkan dilema baru yang menghambat keberhasilan upaya konservasi.

Maka, strategi yang dilakukan oleh pemerintah tidak lagi berfokus pada Pulau Durai, melainkan menjalankan kegiatan yang mendasarkan pada penyadartahuan atau *awareness building*. Kegiatan yang dilakukan oleh LKKPN antara lain mengadakan Bimbingan Teknis *turtle watching* tahun 2018 dengan melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan penyu untuk mendalami materi terkait kondisi kelangkaan serta kerugian yang akan dihadapi masyarakat pesisir jika penyu mengalami kepunahan serta dilanjutkan dengan praktek lapangan yang berlokasi di Pulau Pahat, pulau kedua sebagai lokasi pendaratan dan telur terbanyak setelah Pulau Durai.

Penyadartahuan ke masyarakat yang lebih luas dilakukan dengan memberikan pengetahuan bahwasanya penyu adalah biota yang dilindungi dan jangan sampai ada aktivitas pemanfaatan, beserta regulasi dan sanksi jika terjadi pelanggaran. Edukasi ke masyarakat juga dilakukan untuk menghimbau masyarakat yang memelihara penyu dalam keramba agar secara sukarela melepaskannya. *Awareness building* adalah sebuah proses yang mendesak untuk mulai dilakukan.

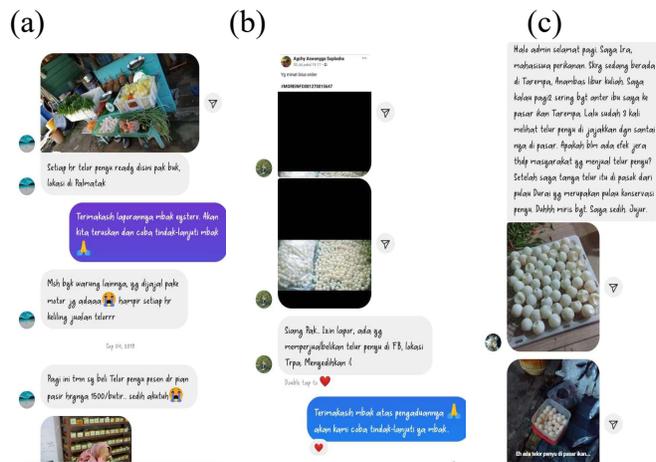
Budaya konsumsi telur penyu merupakan cerminan dari pengetahuan dan kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil terhadap penyu adalah bahwasanya telur penyu itu untuk dimakan. Dengan demikian, LKKPN menganggap bahwasanya penyadartahuan bagi generasi muda sangat penting untuk dilakukan. Kegiatan sosialisasi “Konservasi *goes to school*” telah dilakukan pada tingkatan SD, SMP, SMA sejak tahun 2016, dengan total jumlah sekolah yang sudah didatangi 21 sekolah. Diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat memiliki pengetahuan baru tentang perlindungan penyu.

Secara keseluruhan, penyadartahuan ini ditujukan untuk menjadikan masyarakat berdaya untuk berani melaporkan aktivitas penjualan telur penyu, karena laporan masyarakat adalah indikator kunci. Adapun sejak tahun 2020 sampai sekarang, laporan masyarakat sudah jauh berkurang. Berdasarkan

observasi lapangan, pasar sebagai tempat transaksi masyarakat dalam jual beli telur penyu secara bebas, sudah tidak lagi melakukan aktivitas tersebut sejak tahun 2020. Pengaduan masyarakat kepada LKKPN paling banyak dilakukan melalui *direct message* (dm) dari instagram.

Gambar 1.

- (a). Laporan masyarakat tentang penjualan telur penyu di warung dan motor keliling di tahun 2018
- (b). Laporan masyarakat tentang penjualan penyu pada platform online facebook pada tahun 2019
- (c). Laporan masyarakat penjualan penyu di pasar utama Tarempa, tahun 2019.



Penangkapan dan Penindakan Hukum dan Dampaknya terhadap Konservasi Penyu

Secara spesifik terkait konservasi penyu, telah ada surat edaran Bupati Anambas yang melarang masyarakat untuk memanfaatkan penyu. Meskipun kekuatan hukum dari surat edaran Bupati tidak memiliki kekuatan hukum yang sebanding dengan jika dijadikan peraturan, namun aparat penegak hukum juga tidak bisa maksimal dalam menerapkan sanksi mengingat penjualan telur penyu oleh masyarakat Anambas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Polres Anambas juga turut melakukan sosialisasi pelarangan penjualan telur penyu yang bersifat represif, terutama kepada pemilik lahan yang tidak mau bergabung untuk melakukan konservasi penyu. Jika masyarakat ada yang tertangkap tangan menjual telur penyu, maka telur tersebut tetap tidak dapat ditetaskan namun hal ini akan menimbulkan efek jera dan tekanan kepada masyarakat luas yang masih aktif memanfaatkan penyu. Di tahun 2020, Polres Anambas pernah menggagalkan rencana penjualan telur penyu dan putusan Pengadilan ditetapkan pada bulan Mei 2021 di Cabang Kejaksaan Negeri (Capjari) di Tarempa. Vonis yang ditetapkan adalah 3 bulan kurungan dan denda. Efek jera yang tercipta dari kasus tertangkap tangan ini adalah sebagai bukti nyata ketika masyarakat memanfaatkan penyu nantinya akan berhadapan dengan pidana. Diharapkan agar masyarakat Anambas menjadi lebih takut, waspada dan sadar untuk tidak lagi menjadikan telur penyu sebagai objek jual-beli.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan Premier Oil Indonesia

Untuk merubah budaya yang tidak sejalan dengan keberlanjutan spesies penyu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta untuk mengubah perilaku masyarakat Kepulauan Anambas. Integrasi antara pendekatan *top-down* yang dilakukan melalui gencarnya patroli, penyadartahuan yang disertai dengan penerapan sanksi, telah menghasilkan terbentuknya pendekatan *bottom-up* yang dilakukan oleh masyarakat yang mampu berfungsi menjadi pengawas dan melaporkan kepada pemerintah jika melihat adanya pemanfaatan penyu terutama telur penyu untuk diperjualbelikan.

Upaya konservasi penyu yang kerap gagal menjadi peluang bagi Premier Oil Indonesia untuk berpartisipasi yang ditandai oleh kesepakatan antara perusahaan dan pemilik lahan yaitu Pokmas P4 (Kelompok Masyarakat Peduli Penyu Pulau Pahat) pada tanggal 15 Juli 2014 untuk bekerjasama melaksanakan konservasi penyu di Pulau Pahat dengan rentang waktu selama 10 tahun sampai dengan tahun 2024. Selama 7 tahun (2014-2021) pelaksanaan program konservasi penyu di Pulau Pahat berjalan dengan baik, bahkan Pulau Pahat dikenal sebagai lokasi percontohan konservasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tercatat dari Agustus 2014 hingga Desember 2020, ada 2.138 penyu yang mendarat di pantai Pulau Pahat, 1.718 sarang penyu yang menetas, 382 sarang yang rusak dan 115.643 tukik yang dilepas secara alami di pantai pulau Pahat (Premier Oil 2021). 4 indikator pendataan ini dipublikasikan di dalam website LKKPN Pekanbaru sebagai *ekspose* pengetahuan baru, dimana jika tidak dibantu pemberitaannya maka konservasi ini hanya akan menjadi hal yang eksklusif antara Premier Oil, pemilik lahan dan Pokja P4. Kontribusi dan apresiasi yang dilakukan oleh LKKPN Pekanbaru merupakan bentuk kolaborasi dalam mengkampanyekan semangat konservasi pada masyarakat luas.

Exit strategy yang dicanangkan oleh Premier Oil Indonesia adalah memperkenalkan gagasan pariwisata berbasis konservasi. Ketika program Premier Oil berhenti, otomatis pengelola pulau Pahat akan berpikir bahwa gaji bulanan yang selama ini didapatkan menjadi terancam untuk berhenti. Jika konservasi penyu di Pulau Pahat ingin dijadikan objek wisata dengan menerapkan skema tarif yang direncanakan sebesar Rp 50.000/orang, maka perhitungan minimal adalah wisatawan yang harus didatangkan harus menghasilkan pendapatan yang sama dengan gaji yang diterima dari Premier Oil.

Tantangan utama dalam pengembangan wisata berbasis konservasi penyu di Pulau Pahat bahwasanya secara umum di pariwisata di Anambas belum menjadi industri utama layaknya di Bali atau Lombok, yang memiliki kearifan lokal yang terinstitusionalisasi, dan juga yang mampu secara masif untuk menarik turis untuk datang. Institusionalisasi nilai yang diyakini biasanya berupa hukum adat yang menjadi nilai positif dalam pariwisata berbasis konservasi. Dikhawatirkan jika pariwisata berbasis konservasi penyu ini tidak menguntungkan bagi pengelola, maka mereka akan kembali menjual telur penyu karena mereka dihadapkan dengan kebutuhan ekonomi yang sifatnya harus dipenuhi untuk kebutuhan sehari-hari.

Dinamika Pemilik Lahan yang Melakukan Pemanfaatan Penyu dan Telur Penyu

Pemanfaatan penyu, baik telur maupun dagingnya telah menjadi budaya di kalangan masyarakat Anambas. Masyarakat yang beragama Muslim tidak memiliki budaya akan daging penyu, namun terdapat masyarakat yang identik menjadikan penyu sebagai hidangan terdapat di Desa Mengkait. Setiap kali sosialisasi dilakukan di desa ini, LKKPN Pekanbaru harus bertindak hati-hati karena himbauan pelarangan bersifat sensitif.

Pemilik lahan (biasa disebut pasir) di Kepulauan Anambas sudah mengetahui tentang keberhasilan konservasi penyu di Pulau Pahat. Dampak yang dirasakan oleh kelompok ini adalah tidak lagi dapat menjual telur penyu dari kebun secara bebas.

Seringnya sosialisasi dan patroli oleh pemerintah untuk melarang penjualan telur penyu, sampai berita penjual telur yang tertangkap tangan di Tarempa membuat kelompok ini memiliki ketakutan yang besar jika ditangkap dan ditahan, maka hal tersebut akan mencoreng nama baik keluarga besar dan membuat reputasi desa asal menjadi buruk, selain adanya kecemasan tentang jika tidak bisa menafkahi keluarga. Namun disisi lain, terdapat anggapan bahwasanya larangan untuk memanfaatkan telur penyu sama saja dengan memberi makan pada biawak.

Larangan tersebut juga akan berdampak pada berkurangnya pendapatan dari penjualan telur penyu. Sistem waris atas kebun yang turun temurun ini berbeda setiap keluarganya, namun ukuran kebun yang paling kecil adalah 25 x 6 meter, dimana dalam ukuran ini bisa terdapat 20 lubang telur penyu setiap bulannya. Pendapatan minimal yang bisa diperoleh setiap tahunnya, jika telur dijual seharga Rp 2.000 dan setiap lubang ada minimal 100 butir adalah Rp 48.000.000 ($= 2.000 \times 100 \times 20 \times 12$). Dengan luas kepemilikan kebun yang lebih besar seperti Pulau Pahat atau Durai, memungkinkan telur dapat diambil lebih banyak.

Sehingga dapat dikatakan bahwasanya pemilik lahan kebun selain keluarga di Pulau Pahat menentang adanya konservasi penyu karena berarti pendapatan mereka berkurang, terlebih pada keluarga yang memiliki kebun yang berukuran kecil karena mereka membutuhkan tambahan dari penjualan telur penyu. Selain itu, di berbagai pulau-pulau kecil biasanya terdapat tanah wakaf masjid, dimana pengelolanya juga turut menjual telur penyu dan hasilnya dibagi rata sebagai keuntungan pribadi. Hal ini dijadikan panutan bagi pemilik lahan kebun lainnya, karena anggapan orang yang taat agama saja turut berpartisipasi dan menganggap mengambil telur adalah mengambil hak sendiri, jadi tidak layak untuk diperlakukan seperti mencuri.

Anggapan lain yang menghambat keberhasilan konservasi penyu adalah bahwasanya jika jumlah penyu terlalu banyak di laut maka bisa mengganggu aktivitas nelayan karena menjadi *bycatch*. Kelompok ini beranggapan bahwasanya penyu yang tidak sengaja terjaring akan merepotkan, maka jika jumlah penyu terlalu banyak maka akan menjadi hama. Kelompok ini juga merasakan ketidakadilan karena pengelola konservasi penyu di Pulau Pahat mendapatkan gaji sebagai kompensasi untuk tidak menjual telur, sedangkan mereka tidak menerima apapun dan harus berhadapan dengan perasaan cemas dan takut untuk dapat menjual telur dari kebun mereka.

Pandangan Tokoh masyarakat atas Konservasi Penyu di Kabupaten Kepulauan Anambas

Upaya pencegahan penjualan telur penyu yang selama ini sudah dilakukan dengan, harus didukung oleh kesadaran yang baik pada masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Perlu dilakukan upaya pendampingan dan pembelajaran bagi masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan untuk menguatkan kesadaran yang mulai muncul. Kesadaran masyarakat ini juga mencakup pola pikir masyarakat untuk mampu berpikir komunal, yakni keuntungan bersama yang akan dirasakan jiwa konservasi penyu dan rencana dikembangkannya pariwisata berbasis konservasi.

Wisata penyu ini termasuk juga sebagai wisata edukasi. Dengan demikian, pemahaman atas rantai ekosistem yang melibatkan penyu juga wajib dipahami oleh pengelola, dimana hal ini juga akan menjadi pengetahuan baru bagi para wisatawan. Wisata edukasi dan konservasi yang mengedepankan komunalitas akan menggambarkan semangat gotong-royong yang tinggi dari para pelaku wisata, dan mindset yang akan berkembang adalah tidak mengharapkan kompensasi sebagai penggerak utamanya.

Masyarakat Anambas yang telah terbiasa mengharapkan keuntungan dari kegiatan pemerintahan membutuhkan pendampingan untuk membangun kembali keberdayaan komunal. Jika pola pikir yang didasari oleh kebutuhan komunal dan mampu dilaksanakan secara gotong-royong, akan memberikan kesan yang baik dan membuka peluang untuk dapat bermitra dengan pemerintah maupun swasta.

Dengan demikian, untuk menggagas pariwisata berbasis konservasi dan edukasi penyu yang perlu dilakukan saat ini adalah pendampingan sebelum kegiatan tersebut diresmikan. Karena kesiapan pelaku wisata sangat dibutuhkan dalam kepariwisataan dengan kategori tersebut. Perusahaan tidak akan selamanya memberikan kompensasi, maka memberdayakan Pokja P4 melalui pendampingan adalah suatu hal yang mendesak untuk dilakukan. Di sisi lain, komunikasi dan koordinasi secara formal antara pihak-pihak yang terlibat dalam rencana pariwisata berbasis konservasi harus terus dijalin dengan pemerintahan setempat agar tercipta kerjasama dalam pencegahan penjualan telur penyu terutama di masa mendatang pada saat kegiatan CSR program konservasi penyu yang dilakukan oleh Premier Oil Indonesia telah selesai dilaksanakan.

Diskusi

Meskipun Negara telah mengatur tentang perlindungan penyu, namun aturan yang ada telah gagal untuk mencegah terjadinya *tragedy of the commons* dan mengekang praktek *open-access* dalam pemanfaatan penyu, dimana lokasi bertelurnya penyu dianggap sebagai *common-pool resources* (CPR) yang erat kaitannya dengan keserakahan kolektif (Gardner et al. 1990). CPR dianggap sebagai contoh dilema atas rasionalitas pribadi yang dilemahkan oleh perspektif irasional umum, dimana dilema ini telah menjadi faktor utama di balik perilaku serakah yang tidak terkendali (Cardella et al. 2019).

Struktur regulasi untuk melindungi penyu telah membuktikan tesis Bourdieu yang melihat ketidakmampuan struktur dalam mengontrol perilaku sosial. Kekuatan eksternal memiliki kendala yang lemah dibandingkan dengan *habitus* dan *doxa* yang dibentuk oleh para aktor yang terlibat. Kekuatan internal ini berkembang terus-menerus menjadi kesadaran dan tindakan kolektif (Leaney,

2018). Saat ini, *habitus* dari para stakeholders yang terlibat dalam perdebatan atas perlindungan penyu di Anambas tidak secara keseluruhan mendukung konservasi atas spesies ini.

Wacquant (2013) menekankan pemisahan masyarakat ke dalam kelas-kelas dengan posisi, kondisi, pendirian, dan praktik yang sama, yang tergambarkan dalam keterlibatan stakeholders dalam upaya konservasi penyu. *Habitus* masyarakat di Kepulauan Anambas dalam memanfaatkan penyu yang tidak sejalan dengan konservasi merupakan sebuah pelestarian *habitus* dari generasi ke generasi sebagai struktur penataan sebagai pengaruh kuat dalam membentuk tindakan kolektif (Bouzanis & Kemp 2020). Maka, kehadiran Premier Oil dengan *habitus* baru yang disertai dengan kekuatan modal yang mumpuni untuk melakukan konservasi penyu diharapkan dapat menjadi sebuah dominasi baru di masyarakat dan menempati posisi dengan legitimasi dari kekuasaan formal (Lyke 2017; Atkinson 2019).

Dalam melihat struktur sosial sebagai sebuah dialektika persaingan kekuatan internal aktor dan kondisi eksternal, Bourdieu mengamanatkan legitimasi sebagai sumber pengakuan sosial (Fowler, 2020). Untuk mencapainya, yang dominan dengan sengaja membentuk *habitus* kelas untuk mendukung kekuatan yang ada. *Habitus* kelas dipandang sebagai seperangkat perilaku umum yang menggambarkan kepatuhan dan persetujuan terhadap pihak dominan dengan maksud agar pihak dominan dapat mempertahankan posisinya (McNay, 1999). Oleh karena itu, dominasi juga dimasukkan untuk mengarahkan *habitus* kelas untuk melakukan proliferasi tindakan kolektif jangka panjang, yang dikenal sebagai reproduksi sosial (Faber, 2017).

Habitus kelas dalam struktur perlindungan penyu sedang diperjuangkan oleh Premier Oil Indonesia dimana saat ini posisinya sudah menjadi aktor yang mendominasi kegiatan konservasi penyu di Kepulauan Anambas. Melalui kegiatan CSR konservasi penyu, Premier Oil mengharapkan agar kelompok masyarakat yang terbiasa memanfaatkan penyu untuk patuh terhadap aturan dan tidak lagi melakukan pemanfaatan atas penyu. Diharapkan agar perlindungan dan konservasi penyu dapat menjadi tindakan kolektif secara turun-temurun antar generasi sehingga terbentuk *structuring structure* yang berkelanjutan.

Bourdieu (1991) menyatakan pentingnya modal intelektual bagi yang didominasi untuk secara kompeten mengatur kembali posisi sosialnya. Pengetahuan atas status dilindungi dan ancaman kepunahan spesies penyu merupakan hal utama yang dibutuhkan agar masyarakat yang belum mendukung konservasi penyu untuk melakukan perubahan sikap dan pandangan. Sistem Sosial-Ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam juga melihat akses terhadap pengetahuan sebagai salah satu faktor fundamental dalam proses pengambilan keputusan dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.

Berkes et al. (1994) menyatakan pentingnya kemitraan antara pengetahuan tradisional dan pengetahuan formal dalam pengelolaan sumber daya alam. Menjembatani dua tingkat pengetahuan akan memperkuat kepercayaan dan rasa hormat dari pihak-pihak yang terlibat (Berkes, 2012). Dimilikinya pengetahuan yang berwawasan berkelanjutan akan menjadikan pihak-pihak yang belum mendukung konservasi penyu untuk terlibat dalam kegiatan konservasi.

Penelitian ini juga akan melakukan evaluasi program CSR konservasi penyu yang dilakukan oleh

Premier Oil melalui monetisasi perbandingan antara output dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan input yang merupakan biaya program. Adapun penghitungan SROI ratio adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan SROI Program Konservasi Penyu Premier Oil Indonesia

TAHUN	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL OUTCOME	49,200,000	544,170,00	90,500,00	80,900,000	119,900,00
Attribution ¹⁾	10%	10%	10%	10%	10%
Deadweight ²⁾	0	0	0	0	0
DropOff ³⁾	0	0	0	10%	10%
Total Outcome setelah diskon	44,280,000	489,753,00	81,450,00	64,720,000	95,920,000
Suku Bunga dalam Desimal	4.25%	6.00%	5.00%	3.75%	3.50%
Present Value	42,474,820.14	435,878,426.5	70,359,572.4	55,858,090.72	80,7620,66.17
Total Present Value					685,332,975.9
Total Value of Input					1,928,261,200
SROI Ratio					0.36

Sumber: Premier Oil Indonesia 2021

Attribution dinyatakan (10%) merupakan dampak yang tercipta karena adanya kontribusi sedikit dari program atau pihak lain yaitu pemilik lahan yang berada di pesisir pulau tempat program konservasi dilaksanakan. *Deadweight* dinyatakan (0%) rasionalisasinya adalah dampak tidak akan ada tanpa program atau aktivitas yang digagas dan didanai oleh Premier Oil Indonesia. *Dropoff* dinyatakan (10%) yang merupakan cerminan bahwa dampak akan menurun sebesar 10% pertahun terutama pada tahun 2021 dan 2021 dikarenakan dampak Pandemi COVID-19.

Secara keseluruhan, Premier Oil memiliki citra yang baik di mata Pemerintah atas keberhasilan dalam penetasan tukik di Pulau Pahat. Bagi Pemerintah, *exposing* kegiatan konservasi penyu yang diimbangi dengan patroli dan penegakan hukum berakibat pada berkurangnya kasus penjualan akibat laporan masyarakat sejak tahun 2020. Pemilik lahan konservasi di Pulau Pahat menjadi penerima manfaat utama yang memperoleh pendapatan tambahan yang digunakan untuk membeli aset. Pembangunan infrastruktur konservasi dan wisata berbasis konservasi penyu di Pulau Pahat antara lain pendopo, pembuatan patung, bak penampungan tukik, rumah singgah dan kabin juga membawa manfaat bagi masyarakat yang dilibatkan dalam pembangunan. Namun bagi masyarakat lainnya terutama pemilik lahan yang tidak menerima kompensasi, konservasi penyu ini tidak membawa dampak apapun melainkan membawa perasaan cemas karena tidak lagi dapat menjual telur penyu dengan bebas.

Rasio SROI total dalam lima tahun terakhir yang telah dihitung mencapai 1 : 0,36 di luar aspek-aspek kualitatif yang memiliki potensi dampak sosial dan belum dapat dimonetisasi. Rasio SROI tersebut diartikan bahwa setiap Rp. 1 yang diinvestasikan perusahaan dalam Program Konservasi Penyu mampu menghasilkan dampak sosial sebesar Rp. 0,36. Walaupun rasio yang di dapat tidak begitu besar dan tidak sebanding dengan apa yang telah diinvestasikan oleh perusahaan, hal ini tidak berarti secara mutlak bahwa Program Konservasi Penyu dinyatakan gagal. Nilai dampak dan manfaat secara

kualitatif sehingga tidak dapat di monetisasi merupakan tambahan nilai yang juga harus dipertimbangkan dalam memaknai nilai kembalian dari investasi sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan.

V. Kesimpulan

Kolaborasi dalam pengelolaan konservasi penyu telah menunjukkan kolaborasi antara berbagai pihak dan menunjukkan perubahan yang positif ke arah keberlanjutan. Berkurangnya jumlah pelaporan dari masyarakat mengenai penjualan telur penyu, pengetahuan baru sebagai penyadartahuan terhadap ancaman kepunahan penyu kepada masyarakat, gencarnya patroli di kawasan TWP Kepulauan Anambas, serta proses hukum terhadap rencana penjualan telur penyu telah memberikan efek jera yakni perasaan malu dan cemas yang dirasakan oleh masyarakat jika tertangkap.

Keberhasilan konservasi penyu sebagai progrm CSR perusahaan Premier Oil Indonesia membuat Pemerintah merasa sangat terbantu dan beban untuk menjalankan konservasi juga menjadi terbagi. Dampak positif juga dirasakan oleh pemilik lahan dan pengelola konservasi yang mendapatkan kompensasi dan gaji untuk tidak menjual telur penyu yang ada di kebun mereka, dimana hal ini berdampak pada peningkatan pendapatan. Keseluruhan dampak positif ini dapat diperoleh dengan memiliki pengetahuan dan modal ekonomi yang kuat untuk melakukan konservasi penyu, yang membawa Premier Oil menempati posisi yang terhormat dalam struktur masyarakat Anambas.

Konservasi penyu yang dilakukan oleh Premier Oil Indonesia menimbulkan rasa kompetitif yang positif bagi pemerintah untuk secara aktif mencari lokasi konservasi baru. Namun bagi perusahaan performa ini harus lebih ditingkatkan mengingat perolehan ratio SROI hanya menunjukkan skor 0.36 dari skor yang diharapkan minimal adalah 3 yang mewakili 3 aspek yakni ekonomi, sosial, lingkungan melalui manfaat yang sebaiknya dirasakan oleh lebih banyak orang selain pemilik lahan maupun pengelola.

Namun yang menjadi kekhawatiran adalah keberlanjutan konservasi penyu saat program CSR diakhiri, bahwa masyarakat kembali kepada kebiasaan lama untuk mendapatkan pendapat dari penjualan telur penyu. Dengan demikian, kemandirian pengelola dan pemilik lahan untuk dapat menjalankan pariwisata berbasis konservasi menjadi sangat dibutuhkan. Rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya adalah mengenai strategi konservasi penyu sebagai antisipasi berakhirnya program CSR, atau tentang kapasitas *stakeholders* dalam melaksanakan pariwisata berbasis konservasi penyu di Kepulauan Anambas.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Premier Oil Indonesia untuk pendanaan penelitian ini.

Referensi

- Atkinson, W. (2019). Time for Bourdieu: Insights and oversights. *Time and Society*, 28(3), 951–970. <https://doi.org/10.1177/0961463X17752280>
- Berkes, F. (2012). Implementing ecosystem-based management: Evolution or revolution? *Fish and Fisheries*, 13(4), 465–476. <https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2011.00452.x>
- Berkes, F., Feeny, D., McCay, B. J., & Acheson, J. M. (1989). The benefits of the commons. *Nature*, 340, 91–93. <https://doi.org/10.1038/340091a0>
- Berkes, F., & Folke, C. (1992). A systems perspective on the interrelations between natural, human-made and cultural capital. *Ecological Economics*, 5(1), 1–8. [https://doi.org/10.1016/0921-8009\(92\)90017-M](https://doi.org/10.1016/0921-8009(92)90017-M)
- Berkes, F., Folke, C., & Gadgill, M. (1994). Traditional Ecological Knowledge. In J. B. (eds) Perrings C.A., Mäler KG., Folke C., Holling C.S. (Ed.), *Biodiversity Conservation* (4th ed., pp. 269–287). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5_104248
- Bourdieu, P. (1977). *Structures and the habitus* (pp. 72-95).
- _____ (1991). The peculiar history of scientific reason. *Sociological Forum*, 6(1), 3–26. <https://doi.org/10.1007/BF01112725>
- Bouzanis, C., & Kemp, S. (2020). The two stories of the habitus/structure relation and the riddle of reflexivity: A meta-theoretical reappraisal. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 50(1), 64–83. <https://doi.org/10.1111/jtsb.12225>
- Cadi, A., Delmas, V., Prévot-Julliard, A. C., Joly, P., Pieau, C., & Girondot, M. (2004). Successful reproduction of the introduced slider turtle (*Trachemys scripta elegans*) in the South of France. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 14(3), 237–246. <https://doi.org/10.1002/aqc.607>
- Campbell, L. M. (2007). Local conservation practice and global discourse: A political ecology of sea turtle conservation. *Annals of the Association of American Geographers*, 97(2), 313–334. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2007.00538.x>
- Cardella, E., Kugler, T., Anderson, J., & Connolly, T. (2019). Is greed contagious? Four experimental studies. *Journal of Behavioral Decision Making*, 32(5), 579–598. <https://doi.org/10.1002/bdm.2134>
- Faber, A. (2017). From False Premises to False Conclusions. On Pierre Bourdieu's Alleged Sociological Determinism. *American Sociologist*, 48(3–4), 436–452. <https://doi.org/10.1007/s12108-017-9337-1>
- Fowler, B. (2020). Pierre Bourdieu on social transformation, with particular reference to political and symbolic revolutions. *Theory and Society*, 49(3), 439–463. <https://doi.org/10.1007/s11186-019-09375-z>

Fuentes, M. M. P. B., Limpus, C. J., Hamann, M., & et al. (2011). Vulnerability of sea turtle nesting grounds to climate change. *Global Change Biology*, 17(1), 140–153.

<https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02192.x>

Gardner, R., Ostrom, E., & Walker, J. M. (1990). The Nature of Common-Pool Resource Problems. *Rationality and Society*, 2(3), 335–358. <https://doi.org/10.1177/1043463190002003005>

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. *Science*, 162(3589), 1243–1248.

<https://doi.org/10.1126/science.162.3859.1243>

Harker, R., Mahar, C., Wilkes, C., & et al. (1990). An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu. In *Palgrave Mcmillan*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-21134-0>

Hayes, A. S. (2020). The Behavioral Economics of Pierre Bourdieu. *Sociological Theory*, 38(1), 16–35. <https://doi.org/10.1177/0735275120902170>

Janzen, F. J., Tucker, J. K., & Paukstis, G. L. (2000). Experimental analysis of an early life-history stage: Selection on size of hatchling turtles. *Ecology*, 81(8), 2290–2304.

[https://doi.org/10.1890/0012-9658\(2000\)081\[2290:EA0AEL\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/0012-9658(2000)081[2290:EA0AEL]2.0.CO;2)

Jentoft, S. (2000). The community: A missing link of fisheries management. *Marine Policy*, 24(1), 53–60. [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(99\)00009-3](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(99)00009-3)

Jemarut, W., Webliana, K., Permata Sari, D., & et al. (2021). Kajian Yuridis Perlindungan Penyu. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(April), 70–94.

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2004/1453>

Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016, Rencana Aksi (RAN) Konservasi Penyu Periode 2016-2020, Jakarta, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Laut.

Korten, D. C. (1987). Third generation NGO strategies: A key to people-centered development. *World Development*, 15(1), 145–159. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X\(87\)90153-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(87)90153-7)

Leaney, S. (2019). Habitus as foregrounded history: theorising affect in the social formation of embodied practice. *British Journal of Sociology of Education*, 40(2), 207–221.

<https://doi.org/10.1080/01425692.2018.1525681>

Lyke, A. (2017). Habitus, doxa, and saga: applications of Bourdieu’s theory of practice to organizational history. *Management and Organizational History*, 12(2), 163–173.

<https://doi.org/10.1080/17449359.2017.1329091>

McNay, L. (1999). Gender, Habitus and the Field: Pierre Bourdieu and the Limits of Reflexivity. *Theory, Culture & Society*, 16(1), 95–117. <https://doi.org/10.1177/026327699016001007>

Millar, R., & Hall, K. (2013). Social Return on Investment (SROI) and Performance Measurement: The opportunities and barriers for social enterprises in health and social care. *Public Management Review*, 15(6), 923–941. <https://doi.org/10.1080/14719037.2012.698857>

Nicholls J., Lawloe E., Neitzer E., Goodspeed T. 2012. A Guide To Social Return On Investment. London: Cabinet Office.

2012, A Guide To Social Return On Investment. London: Cabinet Office.

- Olsen, S., Lingane, A., 2004, "Guidelines For Social Return On Investment:", California Management Review, Vol. 46, No. 3, Spring 2004.
- Pathak, Pathik. 2014. Social Return On Investment: Three Technical Challenges. Journal of Social Enterprise.
- Pike, D. A. (2013). Climate influences the global distribution of sea turtle nesting. *Global Ecology and Biogeography*, 22(5), 555–566. <https://doi.org/10.1111/geb.12025>
- Pitcher, T. J., & Lam, M. E. (2010). Fishful thinking: Rhetoric, reality, and the sea before us. *Ecology and Society*, 15(2), 25. <https://doi.org/10.5751/ES-03320-150212>
- Priyono, A. (1985). Studi Reproduksi Penyu Daging, *Chelonia mydas L.* di Pantai Sukamade, Kabupaten Banyuwangi. Undergraduate Thesis, Faculty of Fisheries and Marine Science IPB.
- Ritzer, G. (2010). Sociological Theory. In *McGraw-Hill* (8th ed.). <https://doi.org/10.2307/j.ctt1t892z5.19>
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource*. John Wiley & Sons.
- Wacquant, L. (2001). Durkheim and Bourdieu: The Common Plinth and its Cracks. *The Sociological Review*, 49(1_suppl), 105–119. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954x.2001.tb03536.x>
- Yeh, F. C., Lin, L., Zhang, T., Green, R., Martin, F., & Shi, H. (2021). Advancing sea turtle conservation in the South China Sea via U.S.-China diplomacy. *Environmental Progress and Sustainable Energy*, 40(5), 1–9. <https://doi.org/10.1002/ep.13643>